



2023

**LAPORAN
KEUANGAN**

AUDITED

***KPKNL
BIAK***



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Biak, 31 Januari 2023
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Awalludin Ikhwan
NIP 19801026 200212 1 001



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	45
VI. Lampiran dan Daftar	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK

GEDUNG KEUANGAN NEGARA BIAK JALAN MAJAPAHIT NOMOR 1; KODE POS 98117 TELEPON (0981) 21444, 26111;
FAKSIMILE (0981) 26466; POS-EL (E-MAIL) kpknbiak@kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Biak, 31 Januari 2023
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Awalludin Ikhwan
NIP 19801026 200212 1 001



Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.713.498.551,00 atau mencapai 250% dari alokasi anggaran sebesar Rp686.245.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp1.611.175.724,00 atau mencapai 89% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.806.290.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.414.449.413,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp766.182.925,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp5.648.266.488; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp742.350.432,00 dan Rp5.672.098.981,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.713.498.551,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.924.511.095,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp211.012.544,00. Defisit Kegiatan Non

Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp211.012.544,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp5.942.633.162,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp211.012.544,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 168.720.399,00 dan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp0,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp5.672.098.981,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Triwulan III 2023 menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	686.245.000	1.713.498.551	249,69	2.772.428.469
JUMLAH PENDAPATAN		686.245.000	1.137.314.758	165,73	2.772.428.469
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	1.785.540.000	1.590.924.884	89,10	1.357.077.583
Belanja Modal	B.5	20.750.000	20.250.840	97,59	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		1.806.290.000	1.611.175.724	89,20	1.357.077.583

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK
NERACA
PER 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di bendahara pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas		739.357.000	3.919.874
Persediaan		26.825.925	25.835.250
Jumlah aset lancar		766.182.925	29.755.124
ASET TETAP			
Tanah	C.14	2.613.536.000	2.613.536.000
Peralatan dan mesin	C.15	3.265.292.010	3.197.320.953
Gedung dan bangunan	C.16	3.176.179.760	3.176.179.760
akumulasi penyusutan	C.20	(3.406.741.282)	(3.067.515.869)
Jumlah aset tetap		5.648.266.488	5.919.520.844
ASET LAINNYA			
Aset lain-lain	C.22	-	-
Akumulasi penyusutan dan amortisasi	C.23	-	-
Jumlah aset lainnya		-	-
JUMLAH ASET		6.414.449.413	5.949.275.968
KEWAJIBAN			
Kewajiban jangka pendek			
Utang kepada pihak ketiga	C.25	742.350.432	6.642.806
Utang yang belum ditagihkan		-	-
Uang muka dari KPPN		-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		742.350.432	6.642.806
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.28	5.672.098.981	5.942.633.162
Jumlah ekuitas dana		5.672.098.981	5.942.633.162
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.414.449.413	5.949.275.968

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022**

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.713.498.551	2.771.877.849
JUMLAH PENDAPATAN		1.713.498.551	2.771.877.849
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	101.456.355	42.697.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	804.621.666	633.782.756
Beban Pemeliharaan	D.5	216.514.478	363.011.331
Beban Perjalanan Dinas	D.6	468.413.210	309.764.178
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	333.505.386	366.451.148
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		1.924.511.095	1.715.706.413
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(211.012.544)	1.056.171.436
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	-	550.620
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	550.620
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(211.012.544)	1.056.722.056
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(211.012.544)	1.056.722.056

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
EKUITAS AWAL	1	5.942.633.162	6.217.606.587
SURPLUS/DEFISIT LO	2	(211.012.544)	1.056.722.056
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	3		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	3.A	-	-
REVALUASI ASET TETAP	3.B	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	3.C	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	3.D	-	(19.705.845)
KOREKSI LAIN-LAIN	3.E	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4	(59.521.637)	(1.311.989.636)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	4.A	(270.534.181)	(130.682.749)
EKUITAS AKHIR	E.6	5.672.098.981	5.942.633.162

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

Dasar Hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak
Entitas dan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk
Rencana Strategis meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006. Berkedudukan di Jalan Majapahit No.2, Biak Numfor, Papua.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak diharapkan kualitas laporan Kementerian Negara/Lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diperbarui oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.01/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, telah dibentuk Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang, dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, tugas-tugas seperti penyelesaian mengenai usul penghapusan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau hal-hal lain terkait dengan pengelolaan barang milik negara, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kekayaan negara lainnya, piutang, dan lelang dari Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Papua dan Maluku memiliki nomenklatur baru yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Mulai tahun 2018 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Biak menggunakan Aplikasi SAKTI untuk menggantikan SAIBA dan SIMAK-BMN. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas dan juga menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset

lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dari potongan SPM Gaji Induk;
- Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II diakui setelah disetor ke Kas Umum Negara; dan
- Pendapatan Anggaran Lain-lain atas Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum

tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat

Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Berikut daftar berdasarkan jenis belanja antara lain:

URAIAN	TA 2023	
	ANGGARAN AWAL	AGGARAN SETELAH REVISI
BELANJA		
Kelompok Belanja 52	1.758.260.000	1.785.540.000
Kelompok Belanja 53	20.750.000	20.250.840
JUMLAH	1.779.010.000	1.805.790.840

Realisasi

Pendapatan

Rp1.713.498.551,00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.713.498.551,00. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak berasal dari Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I, Pendapatan Bela Lelang Pegadaian, Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil, dan Pendapatan Anggaran Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	TA 2023		
	ESTIMASI	REALISASI	DALAM %
PENDAPATAN			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	16.000.000	-	0%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	7.000.000	-	0%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.500.000	-	0%
Pendapatan Jasa Lainnya	-	748.900	0%
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	319.000.000	823.268.372	258%
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	322.000.000	869.919.944	270%
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	18.745.000	19.533.774	104%
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil	-	20.660	0%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	6.901	0%
JUMLAH	686.245.000	1.713.498.551	

Realisasi Pendapatan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sampai dengan 31 Desember 2023 lebih tinggi realisasi pada 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Jasa mengalami penurunan dibandingkan TA 2022. Realisasi Pendapatan Jasa terdiri dari Pendapatan Bea Lelang Pegadaian dan Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I. Pada Tahun 2023 terdapat pendapatan baru yang sebelumnya tidak ada di Tahun 2022 yaitu Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil, dan Pendapatan Anggaran Lain-lain

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN	
	2023	2022
PENDAPATAN		
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	550.620
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	748.900	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	823.268.372	1.857.423.753
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	869.919.944	897.966.084
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	19.533.774	17.038.632
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil	20.660,	0,
Pendapatan Anggaran Lain-lain	6.901	0,
JUMLAH	1.713.498.551	2.772.979.089

Realisasi Belanja Negara
Rp1.611.175.724,00

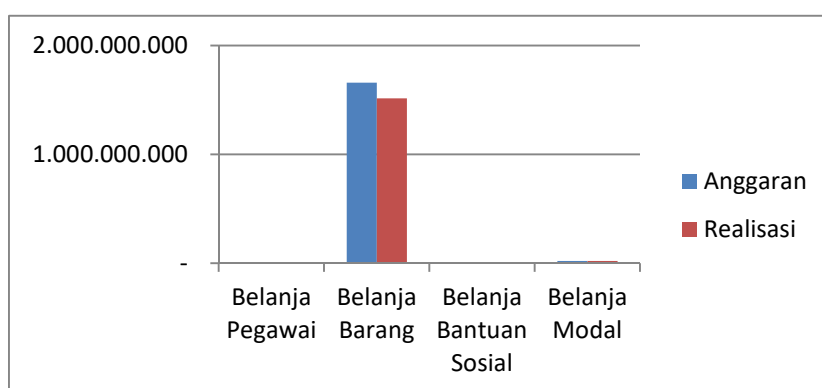
B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.611.175.724,00 atau 70% dari anggaran belanja sebesar Rp1.806.290.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

URAIAN	TA 2023		
	Anggaran	REALISASI	DALAM %
BELANJA			
Belanja Pegawai	-	-	0%
Belanja Barang	1.658.540.000	1.514.613.884	91%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0%
Belanja Modal	20.750.000	20.250.840	98%
JUMLAH	1.679.290.000	1.534.864.724	

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,03% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan anggaran belanja modal yang menyebabkan perbedaan realisasi anggaran pada tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
BELANJA			
Belanja Pegawai	-	-	0,00%
Belanja Barang	1.590.924.884	1.559.255.000	2,03%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00%
Belanja Modal	20.250.840	-	0,00%
JUMLAH	1.611.175.724	1.559.255.000	97%

Belanja Pegawai
Rp0,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas

kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak adanya realisasi disebabkan karena belanja pegawai dibayarkan langsung oleh kantor pusat.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
BELANJA			
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	0%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	0%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	0%
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	0%
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	0%
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	0%
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	0%
Belanja Uang Makan PNS	-	-	0%
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	-	-	0%
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	0%
Belanja Lembur	-	-	0%
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0%
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0%
Jumlah Belanja	-	-	

Belanja Barang

*Rp 1.245.499.567,
00*

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.590.924.884,00 dan Rp1.055.582.251,00. Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami peningkatan 50,72% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya realisasi pagu belanja penambah daya tahan tubuh pada tahun 2022.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
BELANJA			
Belanja Keperluan Perkantoran	439.866.746	272.500.266	61,42
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	60.091.300	-	0,00
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14.683.000	12.189.500	20,46
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	115.820.000	75.040.000	54,34
Belanja Barang Operasional Lainnya	98.124.000	37.212.750	163,68
Belanja Bahan	17.666.500	10.298.000	71,55
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	-	100,00
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	27.701.160	27.356.600	100,00
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1.134.000	100,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	101.646.030	53.242.250	90,91
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44.574.270	224.562.412	
Belanja Langganan Telepon	30.398.460	23.825.637	27,59
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	171.940.208	103.199.953	66,61
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	468.413.210	215.020.883	117,85
Pengembalian Belanja Dalam Negeri	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	-	-	100,00
Jumlah Belanja Kotor	1.590.924.884	1.055.582.251	50,72
Pengembalian Belanja	-	-	100,00
Jumlah Belanja	1.590.924.884	1.055.582.251	50,72

Belanja Modal

Rp20.250.840,00

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.250.840,00 dan Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 100 % dibandingkan belanja modal per 31 Desember 2022 disebabkan oleh adanya belanja modal pada TA 2023.

Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
BELANJA			
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.250.840	-	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	20.250.840	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	20.250.840	-	0,00

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Belanja Modal Tanah pada TA 2022 dan TA 2023.

Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
BELANJA			
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp20.250.840,00 dan Rp0,00. Belanja Peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar 100,0% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya belanja modal pada TA 2022.

Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
Scanner dan Printer	20.250.840	-	0,00
Lemari Display	-	-	0,00
Kursi Kepala Seksi	-	-	0,00
Running Text	-	-	0,00
Motor	-	-	0,00
Mini Bus	-	-	0,00
Lemari Penyimpanan	-	-	0,00
Vertikal Blind	-	-	0,00
Meja Kerja	-	-	0,00
Kursi Rapat Kepala Kantor	-	-	0,00
Rak Arsip	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	20.250.840	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	20.250.840	-	0,00

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada tahun 2023 KPKNL Biak tidak memiliki Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
BELANJA			
Rekonstruksi Rumah Dinas	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan realisasi tahun anggaran lalu. Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2023

Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
BELANJA			
Belanja Modal Jaringan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Lainnya pada TA 2023.

*Belanja Bantuan Sosial
Rp0*

B.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut sampai dengan 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2022. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyak daerah miskin.

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
BELANJA			
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp24.000.000,00*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	0,00
Jumlah	-	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp739.357.000,00*

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing sebesar Rp739.357.000,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
Kas di Bendahara Penerimaan	739.357.000	-	0,00
Jumlah	739.357.000	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp8.279.588,00*

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.279.588,00 dan Rp3.919.874,00. Kas Lainnya dan Setara kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu

investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	739.357.000	3.919.874
Jumlah	739.357.000	3.919.874

Piutang PNBP
Rp0,00

C.4. Piutang PNBP

Saldo piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022
Piutang dari KPPN	0	0
Piutang lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Bagian Lancar
TPA
Rp0

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah

sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022
-	0	0
Jumlah	-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih–Piutang
Lancar
Rp0*

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar TA 2023 dan 2022

KUALITAS PIUTANG	NILAI PIUTANG JK. PENDEK	% PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN
Piutang Bukan Pajak			
Lancar		0,50%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah			
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar		0,50%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah			
Bagian Lancar TPA			
Lancar		0,50%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih			

Belanja Dibayar di Muka
Rp0

C.8. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp0

C.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan
Rp34.271.250,00

C.10. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp34.271.250,00 dan Rp25.835.250,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

JENIS	TA 2023	TA 2022
Persediaan	26.825.925	25.835.250
Jumlah	26.825.925	25.835.250

Tagihan TP/TGR
Rp0

C.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi(TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah

tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih–Piutang
Jangka Panjang
Rp0*

C.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang TA 2022

KUALITAS PIUTANG	NILAI PIUTANG JK. PENDEK	% PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN
Tagihan TP/TGR			
Lancar		0,50%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah			
Tagihan Lancar TPA			
Lancar		0,50%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih			

Tanah
Rp2.613.536.000,
00

C.14. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.613.536.000,00 dan Rp2.613.536.000,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 September 2023	2.613.536.000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang	
-	-
Saldo per 31 Desember 2023	2.613.536.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No.	Lokasi	Luas dalam m2	Nilai
1	Jl. Wandamen	930	731.096.000
2	Jl. Temini	730	551.473.000
3	Jl. Condro	1.219	1.330.967.000
Jumlah			2.613.536.000

Peralatan dan
Mesin
Rp3.262.621.793,
00

C.15. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp3.262.621.793,00 dan Rp3.197.320.953,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	3.197.320.953
Mutasi tambah:	
Pembelian	20.250.840
Transfer Masuk	45.050.000
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 30 September 2023	3.262.621.793
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(2.854.928.011)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	407.693.782

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa:

- a. Mutasi masuk berupa Bracket Standing Peralatan 1 unit sebesar Rp2.800.000,00;
- b. Mutasi masuk berupa LCD Monitor 1 unit sebesar Rp7.000.000,00;
- c. Mutasi masuk berupa Laptop 3 unit sebesar Rp35.250.000,00.
- d. Pembelian berupa Printer 2 unit sebesar Rp10.149.840,00
- e. Pembelian berupa Scanner 1 unit sebesar Rp10.101.000,00

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp3.176.179.760,
00*

C.16. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp3.176.179.760,00 dan Rp3.176.179.760,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	3.176.179.760
Mutasi tambah:	
Pengembangan Melalui KDP	-
Mutasi kurang	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 30 September 2023	3.176.179.760
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(551.813.271)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.624.366.489

Tidak terdapat mutasi transaksi pengurangan gedung dan bangunan dan rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.18. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0

dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	-
Mutasi tambah:	-
-	-
Mutasi kurang	-
-	-
Saldo per 30 September 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Tidak ada transaksi penambahan atau pengurangan per 31 Desember 2023. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp0

C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp3.406.741.282,00

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.406.741.282,00 adalah Rpdan Rp3.067.515.869,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023

Aset Tetap	TA. 2023	TA.2022	Dalam %
Tanah	2.613.536.000	2.613.536.000	0,00%
Peralatan Mesin	3.265.292.010	3.197.320.953	2,13%
Gedung dan Bangunan	3.176.179.760	3.176.179.760	0,00%
Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00%
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	-	-	0,00%
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3.406.741.282)	(3.067.515.869)	11,06%
JUMLAH ASET TETAP	5.648.266.488	5.919.520.844	

*Aset Tak Berwujud
Rp0*

C.21. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak tidak memiliki Aset Tak Berwujud. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	-
Mutasi tambah:	-
-	-
Mutasi kurang	-
-	-
Saldo per 30 September 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Tidak ada transaksi penambahan atau pengurangan per 31 Desember 2023.

*Aset Lain-lain
Rp0*

C.22. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp0*

C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	TA. 2023	TA.2022	Dalam %
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	-	0,00%
AKUMULASI PENYUSUTAN	-	-	0,00%
JUMLAH ASET TETAP	-	-	

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang Muka dari
KPPN
Rp24.000.000,00

C.24. Utang Muka dari KPPN

Saldo Utang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp24.000.000,00 dan Rp0,00. Utang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp45.332.255,00

C.25. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp45.332.255,00 dan Rp3.919.874,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	Penggunaan layanan daya dan jasa yang belum dibayar
Dana Pihak Ketiga	-	-
TOTAL	-	-

Pendapatan

Diterima di Muka

Rp0

C.26. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

URAIAN	JUMLAH
-	-
TOTAL	-

Beban yang Masih

Harus Dibayar

Rp0

C.27. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas

*Rp5.672.098.981,
00*

C.28. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.672.098.981,00 dan Rp5.942.633.162,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp1.713.498.551,
00

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.713.498.551,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023

URAIAN	TA 2023		
	ESTIMASI	REALISASI	DALAM %
PENDAPATAN			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	16.000.000	-	0%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	7.000.000	-	0%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.500.000	-	0%
Pendapatan Jasa Lainnya	-	748.900	0%
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	319.000.000	823.268.372	258%
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	322.000.000	869.919.944	270%
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	18.745.000	19.533.774	104%
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil	-	20.660	0%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	6.901	0%
JUMLAH	686.245.000	1.713.498.551	

Pendapatan dari Pengelolaan BMN berasal dari Pendapatan Penjualan peralatan dan mesin. Pendapatan Jasa berasal dari Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas I. Pendapatan Lain-lain berasal dari Pendapatan Anggaran Lain-lain.

Beban Pegawai
Rp0

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	0%
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	0%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	0%
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	0%
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	0%
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	0%
Beban Tunj. Beras PNS	-	-	0%
Beban Uang Makan PNS	-	-	0%
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	-	-	0%
Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	0%
Beban Uang Lembur	-	-	0%
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	0%
Jumlah	-	-	

Beban Persediaan
Rp83.071.980,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp83.071.980,00 dan Rp42.697.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
Beban Persediaan Konsumsi	101.456.355	42.697.000	137,62%
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	-	-	0,00%
Jumlah	101.456.355	42.697.000	

Beban Barang dan
Jasa
Rp750.539.496,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp750.539.496,00 dan Rp481.977.608,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya beban Penambah

Daya Tahan Tubuh. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
Beban Keperluan Perkantoran	439.866.746	294.921.121	49,15%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6.009.130	-	0,00%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15.166.500	12.189.500	24,42%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	115.820.000	75.040.000	54,34%
Beban Barang Operasional Lainnya	98.124.000	37.212.750	163,68%
Beban Bahan	17.666.500	10.298.000	71,55%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	27.701.160	27.356.600	1,26%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	1.134.000	-100,00%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	0,00%
Beban Langganan Telepon	30.185.460	23.825.637	26,69%
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	0,00%
Jumlah	750.539.496	481.977.608	

Beban

Pemeliharaan

Rp216.514.478,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp216.514.478,00 dan Rp327.762.365,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan dari periode yang sama tahun 2022. Hal disebabkan karena penurunan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023. Rincian Beban Pemeliharaan untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	171.940.208	103.199.953	66,61%
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	0,00%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44.574.270	224.562.412	-80,15%
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	0,00%
Jumlah	216.514.478	327.762.365	

*Beban Perjalanan Dinas
Rp468.413.210,00*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp468.413.210,00 dan Rp215.020.883,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Peningkatan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi perjalanan dinas per 31 Desember 2023 yang lebih banyak dibanding dengan perjalanan dinas pada periode yang sama tahun 2022. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
Beban Perjalanan Biasa	424.133.210	180.060.883	135,55%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.280.000	34.960.000	26,66%
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-	-	0,00%
Jumlah	468.413.210	215.020.883	

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0*

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

*Beban Bantuan Sosial
Rp0*

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada kenaikan atau penurunan pada TA 2022.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp173.751.860,00

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp173.751.860,00 dan Rp193.768.394,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	246.875.218	150.453.310	64,09%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	86.630.168	43.315.084	100,00%
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	-	
JUMLAH PENYUSUTAN	333.505.386	193.768.394	72,12%
JUMLAH AMORTISASI	-	-	
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	333.505.386	193.768.394	

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	0,00%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Nonlancar	-	-	0,00%
Jumlah	-	-	

Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp0,00

D.11. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	0,00%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	0,00%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	0,00%
Surplus/Defisi Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	0,00%
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	0,00%
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	0,00%
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0,00%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0,00%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0,00%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-

Pos Luar Biasa
Rp0

D.12. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI		
	2023	2022	DALAM %
-	-	-	0,00%
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp5.942.633.162,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.942.633.162,00 dan Rp6.217.606.587,00.

Defisit LO

Rp211.012.544,00

E.2. Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan Defisit LO 2022 adalah sebesar Rp211.012.544,00 dan Rp136.178.978,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan nonoperasional, sampai dengan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan

Akuntansi/ Kesalahan

Mendasar

Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Selisih Revaluasi

Aset Tetap

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

<i>Rp0,00</i>	Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
<i>Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Rp19.705.845,00)</i>	E.4.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp00,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
<i>Koreksi Lain-lain Rp0</i>	E.4.5. Koreksi Lain-lain Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Transaksi Antar Entitas Rp59.521.637,00</i>	E.5. Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp59.521.637,00 dan Rp5.496.229,00.
<i>Ekuitas Akhir Rp5.672.098.981,00</i>	E.6. Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.672.098.981,00 dan Rp6.086.923,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Anggaran pada DIPA tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya belanja modal pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2022 tidak ada.